

MEMIKIR (KEMBALI) PROYEK KOTO PANJANG: SEBUAH PERSPEKTIF SOSIAL-BUDAYA

Gusti Asnan

Aspek sosial-budaya adalah bidang yang selama ini relatif terlupakan dalam perjuangan membela masyarakat korban pembangunan PLTA Koto Panjang. Dimensi-dimensi sosial-budaya daerah, Minangkabau umumnya dan Limapuluh Kota serta Kampar pada khususnya, hampir tidak pernah diungkapkan dalam perjuangan selama ini. Kalau pun ada beberapa tulisan atau pembelaan yang menyinggung aspek-aspek tersebut, maka itu sifatnya sangat fragmentaris dan tidak komprehensif.

Tanpa mengabaikan signifikansi aspek-aspek lain, aspek sosial-budaya ini seharusnya juga menjadi dasar pertimbangan dan dasar pembelaan. Kerugian terhadap kedua aspek ini juga tidak sedikit nilainya. Bahkan, berbeda dengan beberapa aspek lain, seperti hilangnya rumah tinggal dan lahan pekerjaan, kerugian terhadap aspek sosial-budaya ini dapat dikatakan sebagai kerugian yang tidak ternilai harganya, sebab aspek-aspek yang rusak dan hilang itu adalah aspek-aspek yang tidak bisa diciptakan lagi.

Karena itu, ada dua pertanyaan penting yang menjadi dasar tulisan ini, yaitu: Aspek-aspek sosial-budaya yang bagaimanakah yang rusak dan atau hilang akibat pembangunan PLTA tersebut? Sejauh mana arti kerusakan dan kehilangan kedua aspek tersebut bagi kehidupan sosia-budaya masyarakat Koto Panjang khususnya dan Minangkabau serta Melayu Riau pada umumnya?

Untuk menjawab pertanyaan itu, maka akan dikemukakan sejumlah fenomena yang berkenaan dengan kedua aspek itu. Fenomena-fenomena yang ingin disampaikan antara lain: 1). Beberapa persoalan studi tentang Minangkabau; 2). Lingkungan alam, masyarakat dan latarbelakang sosial-budaya Minangkabau pada umumnya serta Limapuluh Kota dan Kampar pada khususnya; 3). Signifikansi Limapuluh Kota dan Kampar dalam daerah budaya Minangkabau; 4). Kerugian-kerugian dalam aspek sosial-budaya daerah akibat pembangunan PLTA Koto Panjang.

Beberapa Persoalan Studi tentang Minangkabau

Ada sejumlah persoalan yang membuat kajian tentang Minangkabau relatif sulit dilaksanakan. Dua di antara sejumlah persoalan yang cukup penting itu adalah:

1. Kerancuan pengertian antara Minangkabau dengan Sumatera Barat.
2. Langkanya sumber-sumber sejarah Minangkabau sebelum masuknya bangsa barat (Belanda) ke daerah pedalaman Minangkabau (termasuk sumber-sumber yang berkenaan dengan asal-usul penduduk, pertumbuhan dan perkembangan daerah serta adat-istiadat, sehingga untuk membahasnya sering dipergunakan sumber-sumber yang berasal dari historiografi tradisional).

Minangkabau adalah sebuah daerah budaya. Sebagai sebuah daerah budaya ia memiliki ciri dinamis sehingga dalam perjalanan sejarahnya, tapal batas daerah ini mengalami perubahan dari suatu kurun waktu ke kurun waktu yang lain. Perubahan tersebut terjadi karena adanya mobilitas dari pendukung kebudayaan tersebut.

Menurut *tambo*, historiografi tradisional Minangkabau, cikal-bakal daerah Minangkabau adalah *nagari* Padang Panjang Pariangan, sebuah *nagari* yang terdapat di daerah Tanah Datar. *Nagari* ini dianggap sebagai *nagari* tertua, karena di sinilah rombongan nenek-moyang orang Minangkabau pertama kali muncul.¹ Dari Pariangan Padang Panjang, sebagian anggota rombongan nenek-moyang orang Minangkabau itu melanjutkan perjalanan ke kawasan Agam dan Limapuluh Kota. Di tiga daerah ini mereka memulai kehidupan baru, sehingga Tanah Datar, Agam dan Limapuluh Kota dianggap sebagai daerah inti Minangkabau. *Tambo*, menyebut daerah ini sebagai *Luhak Nan Tigo*, dan karena letaknya di daerah pedalaman maka penduduk setempat juga menamainya *darek*.

Ketika penduduk semakin banyak dan kebutuhan akan lahan pemukiman serta tempat tinggal semakin besar, maka terjadilah ekspansi teritorial ke daerah-daerah yang terdapat di sekeliling *Luhak Nan Tigo*. Perluasan daerah dalam bentuk ini akhirnya mencapai kawasan pantai Sumatera di sebelah barat, mencapai kawasan Talu, Rao dan Lubuk Sikaping di sebelah utara, mencapai daerah Rokan Hulu dan Kampar serta Kuantan di sebelah timur, mencapai daerah XII Koto Sijunjung, Sangir, Muara Labuh hingga Tapan dan Indrapura di arah selatan. *Tambo* menyebut, daerah yang terbentuk sebagai hasil ekspansi terakhir ini dengan daerah *rantau*.²

Jadi, berdasarkan historiografi tradisional Minangkabau, daerah budaya Minangkabau terdiri dari dua daerah utama, yakni *Luhak Nan Tigo* sebagai daerah inti dan *rantau* sebagai daerah hasil mobilitas masyarakat dari daerah inti.

Sumatera Barat adalah sebuah daerah administratif setingkat propinsi. Secara resmi daerah ini dibentuk berdasarkan Perpu No. 17/1957 tentang pemecahan Propinsi Sumatera Tengah menjadi tiga propinsi baru, yakni Propinsi Sumatera Barat, Riau dan Jambi.

Sejak tahun 1945 hingga dirubah menjadi propinsi, Sumatera Barat berstatus sebagai daerah administratif *Keresidenan*. Sebelum merdeka, pada masa pendudukan Jepang daerah ini berstatus sebagai sebuah *Shu* dan dinamakan *Sumatora Nishi Kaigan Shu*. Sebelum pendudukan Jepang ia berstatus sebagai sebuah daerah administratif setingkat *Residentie* dan dinamakan *Residentie Sumatra's Westkust*. Secara resmi, daerah administratif ini dibentuk pada tahun 1906.

Sejak pertama kali dibentuk menjadi daerah administratif, Sumatera Barat memang hampir identik dengan daerah budaya Minangkabau. Sebuah perbedaan yang cukup signifikan adalah, daerah administratif Sumatera Barat juga mencakup Kepulauan Mentawai di lepas pantai barat Sumatera, sedangkan daerah budaya Minangkabau tidak mencakup gugusan kepulauan itu, namun ditambah dengan beberapa daerah di Propinsi Riau, seperti di Kabupaten Kampar dan Kuantan-Singingi.

¹ Menurut *tambo*, nenek moyang orang Minangkabau adalah salah seorang dari tiga putra Iskandar Zulkarnain, yaitu Maharaja Diraja yang berasal dari Dunia Ruhun. Ia beserta rombongannya datang ke daerah ini ketika terjadi banjir besar Nabi Nuh dan mendarat di Gunung Merapi yang waktu itu adalah satu-satunya daratan yang tersisa. Kampung yang mereka dirikan pertama kali setelah mendarat di gunung itulah yang dinamakan Pariangan Padang Panjang.

² Rantau berarti pinggir sungai atau daerah perbatasan. Namun orang Minang juga menamakannya untuk sebuah daerah pemukiman, baik untuk tempat tinggal atau mencari nafkah hidup dan ilmu pengetahuan yang berada di luar daerah inti.

Peta 1 memperlihatkan daerah budaya Minangkabau dan peta 2 memperlihatkan daerah budaya Minangkabau dibandingkan dengan daerah administratif Propinsi Sumatera Barat dan Riau.

Persoalan lainnya tentang studi Minangkabau adalah langkanya sumber-sumber sejarah untuk periode sebelum kedatangan orang Eropah (Belanda). Karena itu, pembahasan tentang sejarah daerah ini sebelum kedatangan orang Belanda, terutama yang berhubungan dengan asal-usul penduduk, pertumbuhan dan perkembangan pemukiman, adat-istiadat – seperti yang dilakukan di atas - terpaksa lebih menghandalkan pada sumber-sumber sejarah tradisional, salah satu di antaranya adalah *tambo*.

Berbeda dengan sumber-sumber tradisional di daerah lain di Indonesia, seperti Jawa atau Makasar, sumber-sumber sejarah tradisional Minangkabau umumnya berbentuk lisan. Sebagaimana layaknya sebuah historiografi tradisional, maka pemakaian *tambo* sebagai sumber sejarah memiliki beberapa kendala, dan salah satu kendala terpenting diantaranya adalah tercampurnya antara unsur fakta dengan mitos. Dengan sebuah ungkapan yang sangat ekstrem, M.D. Mansoer menulis bahwa *tambo* memuat 98 % mitos dan hanya 2 % fakta.³

Dengan latar belakang kelangkaan sumber ini, maka keberadaan sumber-sumber arkeologis menjadi sangat penting.

Minangkabau: Lingkungan Alam, Masyarakat dan Sosial-Budayanya

Lingkungan Alam

Secara geografis daerah budaya Minangkabau berada pada bagian barat kawasan tengah Pulau Sumatera. Diperkirakan daerah ini memiliki luas lebih kurang sekitar 48.000 km². Karena terletak di jalur Pegunungan Bukit Barisan, maka hampir seluruh daerah ini memiliki topografi pegunungan atau perbukitan yang di sana-sini juga memiliki dataran dan lembah. Sampai beberapa waktu yang lalu, pegunungan dan perbukitan itu masih ditutupi oleh hutan hujan tropis yang relatif lebat. Hutan-hutan tersebut ditumbuhi oleh berbagai jenis pohon dan didiami oleh berbagai jenis fauna. Di dataran dan lembah-lembah yang terletak di antara pegunungan dan perbukitan itu penduduk mengembangkan pertanian sawah, sebuah kegiatan yang sangat penting artinya bagi perekonomian warga daerah. Kegiatan pertanian ini bisa berkembang dengan baik karena tersedianya air yang cukup sepanjang tahun. Hampir di setiap lembah mengalir sungai yang merupakan sumber pengairan bagi penduduk.

Sungai-sungai yang ada di daerah ini umumnya berhulu di daerah pedalaman. Karena merupakan bagian dari Pegunungan Bukit Barisan, maka daerah itu memiliki ketinggian rata-rata sekitar 700 meter di atas permukaan laut. Kesemua sungai itu mengalir ke pantai barat dan timur Sumatera. Berbeda dengan sungai yang mengalir ke pantai barat yang umumnya sempit, pendek, berarus deras dan tidak dapat dilayari, maka sungai-sungai yang bermuara ke pantai timur Sumatera umumnya lebar, panjang, tenang dan dapat dilayari. Beberapa sungai yang mengalir ke arah barat adalah Batang Pasaman, Masang, Antokan, Anai, Arau, Indrapura. Sedangkan sungai-sungai yang mengalir ke pantai timur antara lain Sungai Rokan, Kampar, Siak, Indragiri dan Batanghari. Menurut sumber-sumber sejarah, sungai-sungai yang

³ M.D. Mansoer et al., *Sedjarah Minangkabau* (Djakarta: Bhratara, 1970), hal. 37-39.

mengalir ke pantai timur Sumatera telah menjadi prasarana transportasi sejak zaman purba, setidaknya hingga awal abad ke-20.⁴

Secara budaya, daerah Minangkabau berbatasan dengan daerah budaya Batak/Tapanuli di sebelah utara, daerah budaya Melayu Riau dan Jambi di Timur dan daerah budaya Melayu Jambi dan Rejang di Selatan.

Secara administratif, daerah ini berbatasan dengan Propinsi Sumatera Utara di sebelah Utara, Propinsi Riau di sebelah Timur serta Propinsi Jambi dan Bengkulu di sebelah Selatan.

Ke arah barat Sumatera Barat berbatasan dengan Lautan Hindia.

Orang Minang

Sampai tahun 1960-an pendukung kebudayaan Minangkabau disebut “Orang Minang” atau “Orang Minangkabau”. Dalam kepustakaan Belanda mereka juga sering disebut dengan “Minangkabauer”. Sejak diresmikannya Propinsi Sumatera Barat, warga daerah ini juga sering disebut dengan “Orang Sumatera Barat” atau “Orang Padang”. Sebutan terakhir ini barangkali muncul karena ibukota daerah administratif Propinsi Sumatera Barat adalah kota Padang.

Secara antropologis, orang Minang termasuk ras Melayu. Ciri-ciri fisik orang Minang hampir tidak berbeda dengan kelompok-kelompok suku bangsa lain yang termasuk ke dalam ras Melayu. Secara bahasa, bahasa Minang juga termasuk ke dalam rumpun bahasa Melayu, karena terdapat kesamaan yang signifikan antara bahasa Minang dengan bahasa Melayu itu.

Dewasa ini diperkirakan jumlah orang Minang sekitar 7 juta orang. Dari jumlah ini, yang mendiami Sumatera Barat hanya sekitar 4 juta. Sisanya bermukim di luar Sumatera Barat, mulai dari daerah-daerah atau kota-kota lain di sekitar Sumatera Barat di Pulau Sumatera, hingga ke Pulau Jawa, dan bahkan ke hampir seluruh pulau di Indonesia.

Tingginya jumlah orang Minang yang bermukim di luar negeri asalnya bukanlah merupakan gejala baru. Pergi meninggalkan kampung halaman - apakah untuk sementara waktu atau untuk waktu yang lama - telah menjadi tradisi bagi orang Minang. Untuk kegiatan ini, orang Minang memiliki kosa kata tersendiri, yaitu *merantau*. Sedangkan pemukiman di negeri “asing” tersebut mereka namakan *rantau*. Menurut Tsuyoshi Kato, kegiatan merantau telah dimulai sejak waktu yang lama, setidaknya sejak periode legendaris atau menurut M. Joustra dan Josselin P.E. de Jonge sejak abad ke-15.⁵ Kato mengatakan bahwa hingga sekarang telah terjadi tiga tipe merantau dalam sejarah Minangkabau, yaitu merantau perluasan nagari, merantau *babelok* (*circulatory* merantau), dan merantau *Cino* (*Chinese merantau*).⁶ Dari tiga tipe *merantauan* itu, maka fase terakhir yang dilakukan sejak permulaan

⁴ Akira Oki, “The River Trade in Central and South Sumatra in the 19th Century” dalam Tsuyoshi Kato, Muchtar Lutfi dan Narifumi Maeda (eds.), *Environment, Agriculture and Society in the Malay World* (Kyoto: Center for Southeast Asian Studies, Kyoto University, 1986), hal. 3-48.

⁵ Lihat Tsuyoshi Kato, *Matriliney and Migration: Evolving Minangkabau Traditions in Indonesia* (Ithaca and London: Cornell Univ. Press, 1982), hal. 29; M. Joustra, *Minangkabau: Overzicht van het Land, Volk en Geschiedenis* (Leiden: Drukkerij Louis H. Becherer, 1923); Josselin P.E. de Jonge, *Minangkabau and Negeri Sembilan: Socio-Political Structure in Indonesia* (Jakarta: Bhratara, 1960), hal. 9.

⁶ Kato, *Merantau.....*, hal. 29-30.

tahun 1960-an memiliki arti tersendiri, sebab perantauan pada waktu itu merupakan gerakan exodus besar-besaran orang Minang keluar daerahnya. Exodus itu berhubungan erat dengan sikap represif Tentara Nasional Indonesia (TNI) menghadapi pemberontakan Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (PRRI).

Merantau merupakan salah satu identitas orang Minang. Cikal bakal tradisi ini bahkan juga dapat ditelusuri dalam mitologi asal-usul mereka. Seperti yang telah dikatakan pada bagian terdahulu, berbeda dengan kebanyakan suku bangsa di Indonesia yang sering menghubungkan nenek moyang mereka yang berasal dari langit, berasal dari dalam bumi (tanah), atau keluar dari bambu, maka orang Minang mempercayai nenek moyang mereka datang dari negeri yang jauh dan datang ke negeri ini setelah melakukan perjalanan panjang, mengharungi lautan luas serta menyinggahi berbagai tempat terlebih dahulu. Jadi ada spirit pengembara dan untuk melakukan perantauan dalam mitologi asal-usul mereka.

Merantau tidak hanya punya makna perpindahan fisik semata, tetapi juga mempunyai makna perantauan mental. Perantauan tipe kedua ini antara lain diwujudkan dalam bentuk menuntut ilmu (melanjutkan pendidikan). Hasil dari perantauan ini terlihat dari munculnya orang Minang dalam jumlah yang relatif besar dalam dunia intelektual Indonesia, baik intelektual agama (Islam) atau pun sekuler. Dibandingkan dengan jumlah penduduk, maka intelektual Indonesia hingga tahun 1950-an memiliki prosentase tertinggi dibandingkan dengan etnis-etnis lain di Indonesia.⁷

Adanya jumlah kaum terpelajar dalam jumlah yang besar menyebabkan banyak dari orang Minang yang terlibat dalam berbagai gerakan dan aktivitas sosial-politik nasional (terutama pada periode sebelum kemerdekaan). Di samping itu mereka juga banyak yang bekerja sebagai pegawai pemerintahan. Hingga tahun 1950-an, orang Minang tercatat sebagai suku bangsa yang memiliki prosentase tertinggi yang berpendidikan tinggi serta bekerja sebagai pegawai pemerintah atau politisi.

Walau pun orang Minang dianggap sebagai suku bangsa "intelektual", namun secara sosiologis, mereka sesungguhnya adalah pendukung kebudayaan agraris.⁸ Berhubungan dengan itu, tanah merupakan suatu hak milik yang sangat penting artinya bagi orang Minang. Tingginya nilai tanah ini juga didukung oleh sistem dan nilai-nilai sosial yang mereka miliki. Sistem sosial yang dimaksud adalah garis keturunan yang didasarkan pada nasab ibu dan menjadikan tanah sebagai harta pusaka yang hanya bisa diwariskan kepada anak perempuan.

Sistem Matrilineal dan Hak Atas Tanah

Identitas penting lain yang juga membuat orang Minang berbeda dengan suku-suku bangsa lainnya di Indonesia adalah garis keturunan yang matrilineal. Menurut sistem ini sebuah keluarga inti yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tidak ditemui di Minangkabau. Dalam sistem ini, ayah berada di luar keluarga inti, sebab ayah itu sendiri merupakan bagian dari keluarga inti di pihak ibunya. Karena itu, unit

⁷ Willard A. Hanna, "The Role of the Minangkabau in Contemporary Indonesia" Willard a. Hanna, *Bung Karno's Indonesia* (Revised Edition). A Collection of 25 Reports Written for the American University Field Staff, 1961, hal. 3.

⁸ Christine Dobbin, *Islamic Revivalism in a Changing Peasant Economy: Central Sumatra, 1784-1847* (London and Malmo: Curzon Press, 1983), 12-13.

matrilineal yang terkecil dan terpenting di Minangkabau adalah *saparuik*. Secara harfiah, *saparuik* berarti orang-orang yang berasal dari satu kandungan. Namun dalam kehidupan sehari-hari, unit ini biasanya dikenakan kepada orang-orang yang tinggal dalam satu rumah adat atau rumah gadang. Peran suami dalam sistem ini lebih terlihat sebagai bagian dari sistem reproduksi. Karena itu, suami atau ayah hanya pulang ke rumah istrinya bila malam hari saja. Sebagai “ganti” ayah, untuk persoalan sosial kemasyarakatan, termasuk persoalan tingkah laku, kesejahteraan serta persoalan harta pusaka maka *tungganai* (biasanya anggota rumah lelaki yang tertua) memiliki peran yang penting. Bila jumlah anggota *paruik* semakin banyak, maka sebagian dari mereka akan meninggalkan rumah gadang dan membangun pemukiman atau rumah gadang yang lain. Biasanya pemukiman atau rumah gadang yang baru terletak tidak jauh dari rumah gadang yang ditinggalkan. Unit matrilineal yang terbentuk dari gabungan beberapa rumah gadang ini dinamakan *sapayuang*. Urusan dan tanggungjawab sosial kemasyarakatan warga *sapayuang* berada di tangan seorang *penghulu*. Maksudnya, *penghulu* hanya bertindak sebagai penasihat atau penengah atau kadang-kadang sebagai hakim terhadap berbagai persoalan yang tidak bisa diselesaikan oleh *tungganai* pada tingkat *paruik*. Jadi *penghulu* bukan memerintah atas *payuangnya*. Biasanya *penghulu* dijabat oleh lelaki tertua dari *paruik* yang pertama, namun ini bukan suatu keharusan, sebab jabatan itu juga boleh dipergilirkan kepada *paruik-paruik* yang lain. *Saparuik* disatukan dengan *Saparuik* yang lain dalam ikatan darah (keturunan) dinamakan *suku*. Mereka berasal dari satu nenek moyang wanita yang sama, namun sudah tidak dikenal lagi. Sama pada tingkat kaum, *suku* juga dipimpin oleh seorang lelaki yang dinamakan *penghulu suku* (adat leader). Karena warga yang dibawahinya semakin banyak dan persoalan yang diurus semakin kompleks, maka dalam menjalankan tugasnya *penghulu* juga dibantu oleh beberapa fungsionaris adat, seperti *malim* (petugas yang mengurus persoalan agama), *manti* (sekretaris) dan *dubalang* (bidang keamanan).

Secara etimologis *suku* mengandung makna sekaki, seperempat bagian dari seekor hewan ternak seperti kambing, sapi atau kerbau. Karena *suku* di Minangkabau pada mulanya terdiri dari empat *suku* utama, yakni Bodi, Caniago, Koto, dan Piliang maka satu *suku* berarti seperempat dari induk *suku* tersebut. Namun akibat semakin banyaknya jumlah penduduk serta semakin intensifnya kontak dengan dunia luar, jumlah *suku* menjadi semakin banyak sehingga dewasa ini ada sebanyak 100 buah *suku* di Minangkabau. Sebagian dari *suku-suku* yang muncul kemudian itu adalah Balai Mansiang, Banuhampu, Batang, Bendang, Canduang, Capuak, Capuak Napa, Dalimo, Domo, Guci, Jambak, Kampai, Kutianyir, Lamageh, Mandahiling, Mandaliko, Melayu, Lubuak Batang, Pagacancang, Panai, Pangalu, Panyalai, Patapang, Pauh, Payobada, Pisang, Salayan, Salo, Samabua, Sikumbang, Simagek, Singkuang, Sipanjang, Sipasan, Sipisang, Tanjung.⁹

Konsekuensi dari unit-unit matrilieal di atas adalah hak milik dan harta pusaka diwariskan kepada kaum perempuan (dari ibu ke anak perempuan). Salah satu hak milik/harta pusaka yang paling penting bagi orang Minang adalah tanah. Hirarki sosial seseorang juga ditentukan oleh kepemilikan tanah. Sebuah keluarga yang secara sosial memiliki posisi penting dalam sebuah *nagari*, disebut sebagai “orang asa” biasanya juga adalah orang-orang yang memiliki tanah yang luas. Mereka

⁹ de Jong, *Minangkabau.....*, hal. 68-72.

disebut sebagai “orang asa” dan memiliki tanah yang luas karena merekalah yang pertama kali membuka tanah untuk pemukiman dan untuk diolah menjadi lahan pertanian di kampung atau *nagari* itu.

Sebagai “orang asa” dan memiliki tanah yang luas, biasanya mereka juga menduduki posisi-posisi yang strategis dalam pemerintahan kampung (*nagari*). Di banyak *nagari*, biasanya mereka menjadi pemegang otoritas utama dalam kehidupan adat dan agama, misalnya dengan menempatkan wakil mereka sebagai *penghulu pucuk* dan juga petinggi agama di kampung atau *nagari* tersebut.

Metamorfose pemukiman di Minangkabau dimulai dari pembentukan *taratak*. *Taratak* adalah unit pemukiman yang pertama kali dibentuk. Unit ini biasanya terdapat di pinggir atau di dalam hutan. Pembentukan unit ini ada hubungan dengan pembukaan tanah untuk lahan perladangan. Karena itu, pemukiman dalam fase ini masih sangat sederhana, sebab baru ada beberapa pondok yang dibuat dan hanya dipergunakan dalam hubungannya dengan penjagaan ladang, jadi belum untuk ditinggali. Orang yang pertama kali membuka lahan dan membuat unit pemukiman ini adalah cikal-bakal dari “orang asa”.

Ketika jumlah pondok dan penduduk yang mendiaminya semakin banyak maka *taratak* berubah menjadi *dusun*. Pada tahap ini kehidupan mulai stabil. Rumah mulai dibangun secara permanen dan dijadikan sebagai tempat tinggal. Di samping ladang, penduduk juga memiliki sawah. Harta pusaka dan mamak kepala waris mulai terbentuk, *tuo kampung* dan *mamak rumah* juga telah ada. Unit pemukiman yang ke tiga *koto*. Di *koto* rumah tangga telah menjadi lengkap. Sistem sosial matrilineal telah terwujud. *Balai* tempat warga bermusyawarah dan tempat pengendalian pemerintahan serta mesjid tempat melaksanakan ajaran agama telah ada. Secara prinsip penghuni *koto* ini telah memenuhi unsur adat dan agama. Unit pemukiman yang paling sempurna adalah *nagari*. Unit ini sekaligus merupakan unit sosial-politik yang tertinggi dalam masyarakat Minangkabau. Suatu pemukiman baru bisa menjadi *nagari* bila telah memiliki balai tempat musyawarah dan penyelenggaraan pemerintahan; memiliki mesjid tempat sholat dan kegiatan keagamaan; memiliki jalan raya sebagai sarana transportasi; memiliki gelanggang tempat hiburan; serta memiliki tempat mandi untuk sanitasi. Karena *nagari* merupakan fase terakhir dari perkembangan *dusun*, *taratak* dan *koto* maka *nagari* sebetulnya merupakan suatu federasi genealogis. Karena itu “urang asa” tetap memiliki posisi yang paling strategis dalam *nagari* ini.

Nagari mempunyai wilayah sendiri dengan batas-batas (alam) yang jelas. Batas-batas itu antara lain anak air (sungai kecil), lembah-lembah, bukit-bukit atau rimba, pohon bambu, parit yang segaja digali atau *tanah rajo*.

Tiap *nagari* mempunyai pemerintahan masing-masing. *Nagari* dipimpin oleh suatu Dewan Penghulu dan salah seorang dari mereka diangkat sebagai pemimpin (Kepala *Nagari*). Menurut tradisi politik Minangkabau, rakyat *nagari* memilih pemimpin secara bersama-sama, namun sewaktu penjajahan Belanda pemilihan dan pengangkatan Kepala *Nagari* umumnya diintervensi (dilakukan) oleh pemerintah dan ada diantara mereka yang diberi *besluit* sehingga waktu itu populer istilah *Pangulu Basurek*. Intervensi itu dimulai tahun 1823 pada waktu pemerintah Hindia Belanda menjadikan *nagari* sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahannya di daerah ini. Pada waktu pemerintah Hindia Belanda menjadikan *nagari* sebagai unit terendah dalam struktur pemerintahannya di daerah ini. Di samping membantu pelaksanaan

tugas pemerintahan, kepala nagari juga ditugasi mengerahkan warganya untuk kerja paksa guna kepentingan pemerintah serta memungut pajak atau *belasting*. Aroma kolonial dalam kehidupan nagari ini diakhiri dengan pembentukan “Dewan Perwakilan Nagari” dan “Dewan Harian Nagari” tahun 1946 sehingga sejak waktu itu hingga pecahnya PRRI (dengan sedikit kekecualian pada tahun-tahun permulaan 1950) kehidupan nagari dikatakan paling demokratis sepanjang sejarahnya. Namun pada masa Orde Baru intervensi pemerintah terhadap kehidupan nagari muncul kembali, bahkan pada masa itu keberadaan nagari pernah dihapuskan (UU No. 5 tahun 1979 dan Peraturan Daerah No. 7 Tahun 1983). Tidak ada informasi yang resmi dan pasti mengenai jumlah nagari yang pernah ada di Minangkabau. Ketiadaan sumber ini disebabkan oleh karena dinamisnya keberadaan nagari itu. Nagari baru bisa saja didirikan atau dihapuskan bila nagari yang lama, misalnya sudah terlalu sesak penduduknya atau kekurangan penduduk. Namun secara umumnya, ketika nagari dihapuskan oleh pemerintah Orde Baru, jumlah nagari ada sekitar 574 buah. Seiring dengan pemberlakuan UU No. 22 tahun 1999 maka keberadaan nagari yang dinyatakan oleh Orde Baru dihidupkan kembali dengan disepakatinya Perda No. 9 tahun 2000.

Berhubungan dengan tanah ulayat, maka dalam sebuah kaum terdapat tanah ulayat *kaum*, pada tingkat *suku* terdapat tanah ulayat *suku* dan pada tingkat *nagari* terdapat tanah ulayat *nagari*. Tanah ulayat kaum dipergunakan oleh anggota kaum untuk berbagai keperluan sosial dan ekonomi. Biasanya tanah type ini berbentuk sawah, ladang dan lahan perumahan serta terdapat dekat dengan pemukiman inti. Tanah ulayat suku adalah tanah ulayat yang dimiliki dan dikelola oleh suku secara turun temurun, yang dikuasai oleh penghulu suku tersebut dan dipergunakan untuk kepentingan warga suku. Biasanya tanah type ini berbentuk lahan pekuburan, padang penggembalaan ternak, semak-belukar atau rawa-rawa yang terdapat di kawasan pinggiran pemukiman inti. Tanah ulayat nagari adalah sebidang tanah di mana terdapat di dalamnya hak penduduk nagari dan dikuasai oleh penghulu nagari. Tanah type ini biasanya berbentuk fasilitas umum, hutan sebagai cadangan tanah untuk dibuka di suatu saat. Khusus untuk tanah type yang terakhir ini biasanya terletak di lokasi yang relatif jauh dari pemukiman inti.

Tanah-tanah ulayat di atas disebut juga dengan “harta pusaka tinggi”. Di samping itu juga dikenal “tanah pusaka rendah” yang diperoleh seseorang dari pemberian, hibah atau karena pencarian sendiri.

Aturan adat Minangkabau menegaskan bahwa tanah ulayat tidak boleh diperjualbelikan atau digadaikan. Jika sudah dijual wajib dicarikan gantinya dan jika sudah tergadai wajib ditebus. Aturan ini didasarkan pada azas pokok yang memisahkan antara tanah dan ulayat. Tanah secara fisik adalah tetap milik komunal dan tidak boleh dipindahkan kepemilikannya, sedangkan ulayat (pemanfaatannya) berada di bawah kewenangan penghulu. Sifat dari hak ulayat dalam hukum adat Minangkabau adalah: 1). Berada pada masyarakat, tidak pada orang tertentu; 2). Tidak dapat dipindahtangankan kepemilikannya; 3). Hanya dapat dilepaskan untuk sementara jika ada alasan-alasan yang diakui secara adat.

Sayangnya, sejak zaman penjajahan Belanda aturan adat tentang tanah ini mulai diintervensi kekuatan luar. Kenyataan ini telah menimbulkan konflik yang berlarut, apalagi tidak semua elemen masyarakat Minangkabau yang konsisten menjalankan aturan adat tersebut. Pada zaman Belanda misalnya, dalam “Agrarische

Wet” dalam *Staatblad* 1915 No. 9 tentara *Domeinverklaring* untuk Sumatera Barat dikatakan bahwa status ulayat nagari, suku dan kaum menjadi *domein* Kerajaan Belanda. Dalam UUPA dikatakan bahwa ulayat nagari juga menjadi tanah negara. Konflik itu akhirnya semakin berlanjut ketika ada keinginan sebagian anggota masyarakat untuk mendaftarkan tanah mereka. Timbul pro dan kontra terhadap pendaftaran tanah ulayat ini. Hingga sekarang persoalan tersebut masih tetap berlanjut.

Kerugian Sosial Budaya Penenggelaman Koto Panjang

Berdasarkan uraian di atas, dapat dikatakan bahwa pembangunan PLTA Koto Panjang telah menyebabkan munculnya sejumlah persoalan:

1. Penenggelaman kampung telah memutuskan ikatan warganya tanah kelahiran dan negeri asal mereka.
2. Putusnya ikatan negeri negeri asal menyebabkan mereka menjadi orang yang “tidak berkampung” atau “tidak bernagari”, padahal di Minangkabau kampung atau nagari adalah juga salah satu identitas warganya. Perkumpulan-perkumpulan orang Minang hampir selalu mengatasnamakan kampung (nagari). Bila orang Minang saling berjumpa di luar daerah misalnya, maka mereka akan saling bertanya di mana kampung?
3. Memang kemudian mereka dipindahkan ke lokasi yang baru, tetapi ikatan emosional dengan perkampungan yang baru itu tidak ada lagi. Apalagi pemindahan itu tidak dilakukan sesuai dengan aturan adat yang berlaku. Di lokasi yang baru mereka dimukimkan tanpa memperhitungkan aspek-aspek sosial-budaya Minangkabau. Mereka tidak dimukimkan berdasarkan unit matrilineal *saparuik* atau *sapayuang*. Di pemukiman yang baru, unit sosial *saparuik* atau *sapayuang* ini dipecah-pecah. Akibatnya di lokasi yang baru muncul ikatan keluarga yang baru, di mana peranan *nuclear family* yang terdiri dari ayah, ibu dan anak-anak menjadi semakin dominan. Peranan *tungganai* dan *penghulu* menjadi termarginalkan, dan dikuatirkan akan hilang sama sekali.
4. Penenggelaman kampung berarti menenggelamkan tanah warga. Menenggelamkan tanah warga berarti menghilangkan hak warga akan tanah. Padahal tanah adalah harta pusaka yang paling utama bagi warga Koto Panjang dan hak atas tanah adalah salah satu hak dasar bagi orang Minang. Menurut adat Minang, tanah tidak boleh dihilangkan. Kalau itu dilakukan, mereka percaya, malapetaka akan terjadi. Malapetakan itu akan menimpa, baik pihak yang menghilangkan secara langsung atau warga secara keseluruhan. Berbagai kesukaran dan krisis yang terjadi di kalangan pemukim baru di lokasi baru khususnya dan di tingkat bangsa Indoensia pada umumnya sering dikaitkan oleh warga yang tergusur sebagai “hukuman” dari Tuhan terhadap mereka dan bangsa Indoensia.
5. Memang di lokasi yang baru mereka diberi tanah lagi, dengan kata lain ada ganti rugi terhadap tanah mereka. Tetapi tanah yang baru itu tidak mempunyai “arti” sosial dan budaya bagi mereka. Tidak itu saja, dalam banyak kasus, tanah yang baru itu bahkan tidak sebanding luasnya dan kualitasnya dengan tanah mereka yang dihilangkan. Tanah pengganti umumnya terdiri dari tanah liat yang tandus (tidak subur). Mereka mesti

mengeluarkan banyak waktu, tenaga dan biaya untuk mengolah tanah pengganti itu agar bisa menghasilkan. Dan dalam kenyataannya, karena tanah yang kurang atau tidak subur banyak dari usaha mereka yang mengalami kegagalan. Tidak sedikit dari warga yang dipindahkan itu menderita berbagai kesulitan ekonomi setelah mereka dipindahkan.

6. Dengan dimukimkannya mereka di lokasi yang baru, dengan kepemilikan tanah yang relatif sama, dengan hak dan kewajiban yang sama, maka nilai-nilai sosial-budaya yang dimiliki selama ini hilang dengan sendirinya. Jabatan *penghulu* dan fungsionaris adat lainnya bisa saja menjadi rebutan dari semua warga, karena mereka merasa mempunyai kesamaan status, hak dan kewajiban. Di nagari yang lama, misalnya di Tanjung Pauah, masyarakat mengakui hak istimewa beberapa “urang asa”. Keluarga-keluarga yang dipercaya sebagai pemukim pertama di nagari itu mendapat hak untuk menduduki posisi penghulu serta fungsionaris adat lainnya. Sebagian dari mereka adalah Datuk Sipaduko (penghulu suku Domo Dibuah), Datuk Paduko Marajo (penghulu suku Domo Dibukit), Datuk Bijo Dirajo (penghulu suku Piliang Rumah Gadang diUlak) dan Datuk Tan Simarajo (penghulu suku Piliang Rumah Gadang Dimudiak) serta Dt. Marajo (penghulu suku Melayu). Masing-masing penghulu, dalam menjalankan tugasnya juga dibantu oleh fungsionaris adat lainnya, seperti manti, malin dan dubalang. Kelima penghulu (dan fungsionaris adat tersebut di atas) menyepakai untuk mengangkat Dt. Sipaduko sebagai *pucuk nagari*. Pengangkatan ini didasarkan pada kenyataan bahwa dialah yang pertama kali menemukan dan membuka nagari ini. Sekarang dengan tenggelamnya nagari mereka, sistem sosial dan politik seperti itu dengan sendirinya mulai dipertanyakan. “Hak istimewa” “urang asa” terhadap beberapa posisi penting dalam nagari akan dipertanyakan. Di samping itu, hak mereka untuk menjadi penengah atau hakim dalam berbagai persoalan warga nagari akan segera hilang.
7. Penenggelaman kampung juga berarti kehilangan berbagai tradisi lisan dan bukti sejarah warga. Berbagai kisah sejarah atau ungkapan adat asli Minang dikemukakan lewat tradisi lisan. Hal ini terjadi karena orang Minang – secara umum - kurang menghargai tradisi tulis-menulis. Sejarah sebuah kampung, berbagai cerita rakyat tentang nagari itu dikemukakan dengan tradisi lisan. Sebagai layaknya tradisi lisan, untuk menguatkan aspek penceritaannya selalu dihubungkan dengan fenomena alam, seperti batu yang menyerupai orang, binatang, benda-benda seperti alat-alat rumah, kapal, rumah atau situs-situs tertentu seperti bukit, gunung, sungai, lubang, muara, pohon kayu besar, batu besar dan lain sebagainya. Berkaitan dengan tradisi lisan, maka pembangunan waduk juga telah menghilangkan puluhan atau ratusan cerita rakyat yang berhubungan dengan sejarah nagari, kisah-kisah yang berisikan ajaran moral, upacara-upacara pertanian dan ritual religius yang lainnya. Banyak situs atau lokasi yang dipercaya masyarakat memiliki makna sejarah dan berhubungan dengan sejumlah kisah yang berisikan ajaran moral dan bernilai sosial-religius telah tenggelam. Itu semua tidak akan pernah tergantikan. Ini adalah sebuah kehilangan besar dan sangat besar dari semua warisan sejarah dan budaya daerah.

8. Pembangunan waduk memang secara langsung tidak menenggelamkan candi, tapi penelitian yang dilakukan arkeolog dan sejarawan menunjukkan bahwa dan yang ada di sekitar candi akan mempengaruhi kondisi fisik candi karena adanya perembesan air. Berbeda dengan candi yang ada di Pulau Jawa seperti Borobudur yang terbuat dari batu monolith, maka Candi Muara Takus terbuat dari tanah liat (batu bata), sehingga perembesan dikhawatirkan dapat menyebabkan semakin cepatnya kerusakan candi. Diperkirakan, dalam waktu 50 tahun, candi tersebut akan mengalami kerusakan serius. Apalagi, menurut sejumlah temuan, masih ada bagian candi yang masih berada di bawah permukaan tanah. Hancurnya Candi Muara Takus menyebabkan kesulitan dalam pengungkapan sejarah Minangkabau zaman Hindu-Budha, karena sampai sekarang untuk daerah timur Sumatra Candi Muara Takus merupakan satu-satunya bukti historis untuk mengungkapkan sejarah Minangkabau periode Hindu-Budha. Hancurnya candi Muara Takus menyebabkan hilangnya kebanggaan orang Minangkabau khususnya dan Limapuluh Kota dan Kampar pada umumnya.
9. Penenggelaman juga ikut menghambat upaya penelusuran sejarah Minangkabau periode klasik. Seperti yang telah dikatakan di atas, *tambo* menyebut bahwa nenek moyang orang Minangkabau menyebar dari Tanah Datar ke Agam dan Limapuluh Kota dan dari sini menyebar lagi ke daerah-daerah lain di sekitarnya. Tradisi lisan ini secara ilmu pengetahuan tidak bisa diterima, karena tidak didukung oleh bukti-bukti yang empiris. Secara logika, pola penyebaran tersebut tidak masuk akal, karena menurut teori perpindahan orang Indonesia, nenek moyang orang Indonesia berasal dari wilayah Hindia Belakang. Berdasarkan bukti-bukti empiris arkeologis, orang Minangkabau juga berasal dari wilayah tersebut dan masuk ke Minangkabau melalui sungai-sungai besar yang mengalir di kawasan timur pulau Sumatra, seperti Sungai Rokan, Kampar, Siak, Indragiri dan Batanghari. Bukti-bukti arkeologis tersebut antara lain dapat ditemukan dalam bentuk goa-goa prasejarah yang dijadikan sebagai tempat hunian di kawasan Limapuluh Kota (di dalamnya ditemukan peninggalan-peninggalan purba yang terbuat dari batu atau dipahatkan di batu). Di samping itu juga ditemukan megalith-megalith serta berbagai tradisi batu besar lainnya yang tersebar di beberapa tempat di kawasan Limapuluh Kota. Dengan demikian, daerah Limapuluh Kota merupakan daerah yang sangat penting untuk mengetahui sejarah orang Minangkabau sebelum masa penjajahan Belanda. Nilai tambah ini juga ditambah dengan adanya candi Muara Takus. Candi ini sangat penting artinya untuk menelusuri jejak sejarah Minangkabau pada zaman Hindu/Budha. Apalagi kurun waktu ini adalah sebuah kurun waktu yang relatif penting artinya bagi Minangkabau, sebab cikal-bakal berbagai struktur sosial dan sistem politik tradisional Minangkabau – diperkirakan – diletakan dasarnya pada waktu ini. Hasil penelitian ahli bahasa juga menunjukkan bahwa daerah Limapuluh Kota adalah daerah tertua di Minangkabau. Kesimpulan ini didasarkan pada temuan yang menunjukkan, bahwa dari 17 dialek yang ada di Minangkabau, maka dialek Limapuluh Kota adalah dialek tertua. Dengan ditenggelamkannya daerah sekitar Koto Panjang, maka beberapa bukti historis yang dimiliki daerah itu juga ikut hilang, dan upaya penelusuran

kembali sejarah Minangkabau zaman klasik itu juga akan mengalami hambatan.

Apa yang Harus Dilakukan

1. Hentikan dan batalkan kelanjutan proyek ini.
2. Inventarisasikan dan dokumentasikan seluruh aspek sosial-budaya yang telah hilang.
3. Terbitkan hasil inventarisasi dan dokumentasi itu dalam bentuk buku dan sebarluaskan ke tengah masyarakat, terutama anak didik tingkat Sekolah Dasar hingga SLTA.
4. Pertahankan kondisi permukaan air sekitar 75 meter.

---o0o---

コトパンジャン プロジェクトの再考 社会・文化的観点

グスティ アスナン

社会・文化的側面はこれまで、コトパンジャン (Koto Panjang) 発電所建設の被害者を守る闘いにおいて、他の側面に比べて比較の見落とされてきた視点である。大きくはミナンカバウ (Minangkabau) 地域の、細かくはリマプル・コタ (Limapuluh Kota) およびカンパル (Kampar) 地方の社会・文化的特質は、これまでの被害者擁護の闘争でもほとんど言及されていない。これらの側面に触れた文書や被害者を擁護する論議は、あったとしてもかなり断片的で、包括性に乏しいものであった。他の側面の重要性を欠くことなく、社会・文化的側面についても、コトパンジャンプロジェクトの検討と被害者擁護の基礎とするべきである。この2つの側面で生じる損失も、住民の被害と同様に甚大である。それどころか、家屋や農地の喪失などとは異なり、社会・文化的側面での損失は、破壊され失われた後、再び創造することができないという点において、量り知れぬ価値の損害であるといえる。このことから、本稿の基礎となる重要な疑問は以下の2つである。すなわち、発電所建設によって滅ぼされ、失われた社会・文化的側面とはどのようなものか。そしてこの2つの側面の損失は、特にコトパンジャン共同体の、大きくはミナンカバウおよび Melayu Riau (リアウムラユ《訳注；伝統的にリアウ州に居住するマレー系諸民族を指し、西スマトラ州に隣接するリアウ州西部に住むミナンカバウ民族も含まれる》) の社会・文化的生活において、どの程度の影響を与えたか。これらの疑問に答えるために、社会・文化的側面に関連したいくつかの事象を取り上げる。それらの事象とは、次のとおりである。1) ミナンカバウに関する研究をめぐる諸問題、2) ミナンカバウ地域全般と、リマプル・コタおよびカンパル地方の自然環境、社会、および社会・文化的背景、3) ミナンカバウ文化圏におけるリマプル・コタおよびカンパル地方の重要性、4) コトパンジャン発電所建設による地域の社会・文化的損失。

ミナンカバウ研究をめぐる諸問題

いくつかの問題のために、ミナンカバウに関する研究を進めることにはかなりの困難が伴う。それらの問題のうち重要性の高いものとして、次の2つが挙げられる。

1. ミナンカバウと西スマトラ (Sumatera Barat) の区別があいまいであること。
2. 西洋人 (オランダ人) がミナンカバウ内陸部にやって来る以前のミナンカバウの歴史的記録が乏しいこと (歴史的記録とは住民の起源、地域の生成・発展、および習慣と伝統に関連した資

料などを含む。そのため、この地域について論じる際には、多くの場合、伝統的史書が用いられている。)

ミナンカバウとは、1つの文化圏である。1つの文化圏として、ミナンカバウは固有の動態的な特徴を持っており、その歴史的発展を通じて、時代から時代への移行とともにミナンカバウの境界は変化してきた。そのような境界の変化は、ミナンカバウ文化の担い手の地理的移動によって生じたといえる。

Tambo (タンボ) というミナンカバウの伝統的史料によると、ミナンカバウ地域の起源は、パダン・パンジャン (Padang Panjang) のパリアンガン (Pariangan) という *nagari* (ナガリ; 村) で、これはタナ・ダタル (Tanah Datar) 地域の *nagari* である。ここにミナンカバウの祖先のグループが初めて現れたと信じられていることから、この村は最古の村と考えられている。¹ このミナンカバウの祖先グループの一部は、パダン・パンジャンのパリアンガン村からアガム (Agam) およびリマプル・コタ地方へと移動を続けた。これらの3つの地域で、人々は新しい生活を始めたので、タナ・ダタル、アガム、およびリマプル・コタは、ミナンカバウの中心地域と考えられている。*tambo* では、この地域を *Luhak Nan Tigo* (ルハック・ナン・ティゴ; 3つの地域) と名づけられ、内陸に位置しているため、現地住民はその地域を *darek* (ダレック 内陸地) とも呼ぶ。

人口が増え、開墾したり家屋を建てたりするための土地の必要性が増した結果、ルハック・ナン・ティゴの周辺へとミナンカバウ地域が拡大した。この種の地域的拡大は、最終的に西はスマトラ島沿岸地域、北はタル (Talu)、ラオ (Rao)、およびルブック・シカピン (Lubuk Sikaping)、東はロカン・フル (Rokan Hulu)、カンパルおよびクアンタン (Kuantan) にまで達した。また、南はドゥアブラス・コト・シジュンジュン (XII Koto Sijunjung)、サンギル (Sangir)、ムアラ・ラブ (Muara Labuh) からタパン (Tapan) およびインドゥラプラ (Indrapura) までの地域に達した。*tambo* では、この新たに拡大した地域は *rantau* (ランタウ) と呼ばれる。²

したがって、ミナンカバウの伝統的史料によると、ミナンカバウ文化圏は、2つの主要地域からなる。すなわち、中心地域であるルハック・ナン・ティゴと、中心地域から人々が移動することによって生じた地域である *rantau* (ランタウ) である。

¹ *tambo* によると、ミナンカバウの祖先は、Iskandar Zulkarnain (イスカンドル・ズルカルナイン; アレクサンダー大王、*Ruhun* 世界最大の帝王) の3人の息子の1人で Maharaja Diraja (マハラジャ・ディラジャ) といった。ノアの大洪水が起こったとき、王とその従者たちがこの地域にやって来た。彼は、当時、唯一の乾いた土地であったムラピ (Merapi) 山に錨を降ろした。彼らが山の上に錨を降ろしたあと最初に創った村が、パリアンガン・パダン・パンジャンと名づけられた。

² *Rantau* とは、川岸またはフロンティアを意味する。しかし、ミナンカバウの人々は生計をたてたり新しい知識を得るために故郷の外に定住する際にも、これらの地をランタウと呼ぶ。

西スマトラは、州レベルの行政区域である。この地域は、法律に代わる政令 (Perpu; Peraturan Pemerintah Pengganti) 1957年第17号によって公式に形成された。これは、中部スマトラ州を3つの新しい州、西スマトラ、リアウ (Riau)、およびジャンビー (Jambi) 州に分割する政令である。

1945年から州の設立まで、西スマトラは、Keresidenan (県) 行政区域としての地位を持っていた。独立以前、日本の占領下では、この地域は *Shu* (州) の地位を持っており、スマトラ西海岸州 (*Sumatora Nishi Kaigan Shu*) と名づけられていた。日本軍占領以前には、この地域は、*Residentie* (レジデンティー; 首都、王宮所在地) レベルの行政区域であり、*Residentie Sumatre's Westkust* (レジデンティー・スマトラス・ヴェストクスト; スマトラ西海岸首都) と名づけられていた。公式には、この行政区域は、1906年に形成された。

最初に行政区域として設立されて以来、西スマトラはミナンカバウ文化圏とほぼ同等に認識されている。1つの大きな違いは、西スマトラ行政区域がスマトラ島沖にあるムンタワイ (Mentawai) 諸島を含むのに対し、ミナンカバウ文化圏はそれを含まず、代わりにカンパルおよびクアンタン・シギンギ (Kuantan-Singingi) など、リアウ州のいくつかの地域が加わることである。

地図1はミナンカバウ文化圏を示し、地図2は西スマトラおよびリアウ州行政区域との比較を示す。

ミナンカバウ研究に関する別の問題は、ヨーロッパ人 (オランダ人) がやって来る前の時期について史料が不足していることである。したがって、オランダ人が到着する以前のこの地域の歴史的研究、特に住民の起源、定住地の成長と発展、習慣と伝統に関連する歴史的研究は、先に行なったように、伝統的史料に頼らざるを得ない。その伝統的史料の1つが *tambo* である。

ジャワ (Java) やマカッサル (Makassar) といったインドネシアの他の地域の伝統的史料と異なり、ミナンカバウの伝統的史料は、一般に口承の形式をもつ。他のあらゆる伝統的史書と同じく、*tambo* を史料として使用する場合、いくつかの支障が生じる。その最も重大な問題は、事実の中に神話が挿入されていることである。別の極端な言い方をすれば、M. D. マンスール (M. D. Mansoer) は、*tambo* の98%が神話であり、事実は2%に過ぎないと報告している³。

このように歴史的記録が不足しているため、考古学的資料が非常に重要になるのである。

ミナンカバウ：自然環境、共同体、および社会・文化的側面

³ M. D. マンスール et al., : ミナンカバウの歴史 (ジャカルタ: Bhratarata, 1970年), p. 37-39.

自然環境

地理的には、ミナンカバウ文化圏は、スマトラ島中部の西側に位置している。その面積は約 48,000 km² とされる。ブキット・バリサン (Bukit Barisan) 山脈上に位置し、この地域のほぼ全体があちこちに平野と盆地の分布する山岳および丘陵の地形をもつ。数十年前までは、その山岳と丘陵はまだ比較的密な熱帯雨林で覆われていた。熱帯雨林はさまざまな種類の樹木であふれ、多数の動物相の生息地であった。ミナンカバウの人々は、山岳や丘陵の間に広がる平野や盆地で水田耕作を発展させた。水田耕作は、この地域の人々の経済において非常に重要な意味をもつ活動となった。この農業活動は、1 年を通して十分な水が供給されることから順調に発展した。住民の灌漑用水の源となる河川は、ほぼすべての盆地を流れている。

この地域の河川は、一般に内陸部に水源をもつ。内陸部はブキット・バリサン山脈の一部であることから、平均して海拔 700m の高さに位置する。これらの河川は、すべてスマトラ島の東西の海岸に流れ込む。西海岸に注ぐ河川が、一般に狭くて短く、流れが激しいので船が航行できないのに対して、東海岸に注ぐ河川は、一般に広くて長く、流れが穏やかで、船の航行が可能である。西海岸に注ぐ河川には、バタン・パサマン (Batang Pasaman)、マサン (Masang)、アントカン (Antokan)、アナイ (Anai)、アラウ (Arau)、およびインドウラプラ (Indrapura) などがある。一方、東海岸に注ぐ河川は、ロカン (Rokan)、カンパル (Kampar)、シアック (Siak)、インドウラギリ (Indragiri)、およびバタンハリ (Batanghari) である。史料によると、スマトラ島の東海岸に注ぐ河川は、先史時代から少なくとも 20 世紀初頭までは輸送手段として使用されていた。⁴

文化的には、ミナンカバウ地域は、北はバタック (Batak) / タパヌリ (Tapanuli)、東はリアウマレー (Melayu Riau) およびジャンビー (Jambi)、そして南はジャンビーマレー (Melayu Jambi) およびレジャン (Rejang) の各文化圏と境を接している。

行政的には、この地域は、北は北スマトラ (Sumatera Utara) 州、東はリアウ (Riau) 州、そして南はジャンビー (Jambi) 州、ベンクル (Bengkulu) 州に隣接している。

西スマトラの西側はインド洋に面している。

Orang Minang (ミナン人)

1960 年代まで、ミナンカバウの人々は「Orang Minang (オラン・ミナン)」(ミナン人) または「Orang Minangkabau (オラン・ミナンカバウ)」(ミナンカバウ人) と呼ばれていた。オランダの文献では、彼らは

⁴ 大木昌, 19 世紀の中部および南部スマトラにおける河川交通 マレー世界の環境、農業、社会 (*Environment, Agriculture, and Society in the Malay World*) 加藤剛、ムクタール・ルッフイ、前田成文(京都: 東南アジア研究センター、京都大学、1986 年) pp 3-48.

「Minangkabauer」(ミナンカバウア)とも称されていた。また、公式に西スマトラ州となって以降は、この地域の住民は、「Orang Sumatera Barat (オラン・スマトラ・バラット)」「(西スマトラの人)、または「Orang Padang (オラン・パダン)」「(パダン人)とも呼ばれている。おそらく、最後の呼称は西スマトラ行政州の州都がパダン(Padang)であることから発生した。

人類学的には、ミナンカバウ人はマレー民族に属する。ミナンカバウ人の体型的特徴は、マレー民族に属する他の民族集団とほとんど差がない。また言語学的にも、ミナンカバウ語は、マレー語と相当な類似性を持つことからみて、マレー言語族に属する。

最近では、ミナンカバウ人は約700万人とされている。そのうち西スマトラに居住している人々は、約400万人に過ぎない。その他の住民は西スマトラの外に居住しているが、スマトラ島の西スマトラ州付近の地域や都市から、ジャワ島のみならずインドネシア国内のほぼすべての島にまでおよぶ。

故郷を離れて生活するミナンカバウ人が多いことは、新しい傾向ではない。故郷を離れることは(短期、長期間にかかわらず)、ミナンカバウ人にとっては伝統となっている。こうした活動を表す言葉として、ミナンカバウ人は「*merantau* (ムランタウ)」という固有の単語をもつ。またそれに応じて、彼らが居住する故郷の「外」の地を「*rantau* (ランタウ)」と呼ぶ。加藤 剛 (Tsuyoshi Kato) 氏によると、ムランタウの慣習ははるか昔に始まったとされ、少なくとも伝説の時代以降、または M. ヨウストラ (M. Joustra) 氏とヨセリン P. E. デ ヨング (Josselin P. E. de Jong) 氏によると15世紀以降とされている。⁵ 加藤氏によると、ミナンカバウの歴史上、現在までにムランタウには3つのタイプがあった。すなわち、*merantau perluasan nagari* (*nagari* を拡大するためのムランタウ)、*merantau babelok* (循環的な《訳注；インドネシア語では *berbelok* : 曲がる》ムランタウ)、および *Merantau Cino* (《訳注；インドネシア語では *Cina* : 中国》中国人のムランタウ) である。⁶ これら3つのタイプのムランタウにおいて、1960年代初頭から始まった、最後の段階のムランタウには特別な意味をもった。その時代のムランタウはミナンカバウ人の西スマトラ大量流出となったからである。この大量移住は、インドネシア共和国革命政府 (PRRI) の蜂起に対処するインドネシア国軍 (TNI) の鎮圧行動と密接に関係していた。¹

⁵ 次の文献を参照。加藤剛, 母系そして移住：インドネシア、発達するミナンカバウの伝統(イターカ、ロンドン：コーネル大学出版, 1982年), pp 29; M. ヨウストラ, ミナンカバウ：土地、民族と歴史の概要(レイデン：ルイス H. ベヘレール印刷, 1923年); ヨセリン P. E. デ. ヨング, ミナンカバウとヌグリ・スンビラン：インドネシアにおける社会政治構造(ジャカルタ：Bhratarata, 1960年), p 9.

⁶ 加藤剛, *Merantau.....*, pp. 29-30.

¹ TNI は Tentara Nasional Indonesia (インドネシア国軍) を表し、PRRI は Pemerintah Revolusioner Republik Indonesia (インドネシア共和国革命政府) を意味する。

ムランタウは、ミナンカバウ人を代表する特徴のひとつである。また、この伝統は、ミナンカバウ人の起源に関する神話にまでさかのぼることができる。インドネシアの多くの民族集団が、先祖の起源を天や大地（地面）から現れた、または竹から出てきたなどに関連づけるのは異なり、ミナンカバウ人は冒頭で論じたように、自分たちの先祖は遠い国に発し、大洋を渡る長い旅路を経て、さまざまな土地を訪れてからこの国に到着したと信じている。つまり彼らの起源にまつわる神話においてもムランタウを行なう放浪の精神をもつのである。

ムランタウは、物理的な移動にとどまらず、精神的な試練という意味ももつ。この第2の意味のムランタウはとくに、学問を志す（進学志向）という形で実現される。このムランタウの成果は、インドネシアの知識人にみられるミナンカバウ人の数が、宗教（イスラム）的知識人のみならず、世俗の知識人に関しても、比較的多いことから明らかである。インドネシアの民族集団の中では、1950年代までのミナンカバウ人知識人は、ミナンカバウの総人口と比べて最も高い割合を占めていた。⁷

ミナンカバウ人は教養のある者が多かったことから、たくさんのミナンカバウ人が（特に独立前の時期に）全国レベルのさまざまな社会・政治運動および活動に参加することになった。また彼らは政府の役人として働く者も多かった。1950年代までミナンカバウ人は、高等教育を受け、政府の役人または政治家として働く者の割合が最も高い民族集団として記録されていた。

ミナンカバウ人は「知識人」民族集団とみられていても、社会学的には、現実には農耕文化持つ民族集団である。⁸ それと関連して、土地はミナンカバウ人にとってきわめて重要な意味をもつ財産である。土地に対する高い位置づけは、ミナンカバウ人の社会システムと価値観によっても支えられている。ここでいう社会システムとは、母親と子供を基礎とする母系の系列であり、土地を娘だけが相続できる遺産として位置づけるものである。

母系制と土地所有

ミナンカバウ人をインドネシアの他の民族集団と区別する、別の重要な特徴は、母系の *adat*（慣習）または伝統である。おそらく、ミナンカバウは世界最大の母系社会の1つである。この制度のために、父親、母親、および子供で構成される核家族はミナンカバウには存在しない。この制度では、父親は核家族の外に置かれる。父親自身が自分の母方の核家族の一員だからである。したがって、ミナンカバウの最小の母系単位は *saparuik*（サパールイック《インドネシア語では *seperut*》；同じ腹、一つの腹）である。

⁷ ウィルラード・A.ハンナ，“現代のインドネシアにおけるミナンカバウの役割” ウィルラード・A.ハンナ，カルノさんのインドネシア（改訂版）. A collection of 25 Reports Written for the American University Filed Staff, 1961年, p. 3

⁸ クリスティン・ドビン，変化する農民経済の中でのイスラム復古主義：中スマトラ，1784-1847（ロンドン、マルモ：カーゾン出版，1983年），p. 12-13.

これは文字どおり同じ子宮から生まれた人々を意味する。しかし日常生活では、それは一般に *rumah gadang* (ルマ・ガダン《訳注：インドネシア語では *rumah besar*》、big house：大きな家) または *rumah adat* (ルマ・アダット、adat house：慣習法の家) で生活する人々の集団に結び付けられている。ルマ・ガダンまたはルマ・アダット自体は、ミナンカバウの伝統的な家屋である。それは独特の建築様式をもつ。屋根の形は水牛の角(2対、3対、もしくは4対の角)に似せられてヤシの繊維で作られており、色鮮やかな彫刻を施した木製の壁を持つ。家の長さは8~54 m、幅6~8 mで、床は地上約1.5~2.5 mに位置する。家屋の大きさは、家族の人数と財政的能力に左右される。この家屋に居住するのは、未婚者、既婚者および子供(10歳未満)である。彼らは、家屋の奥に1列に備え付けられた寝室(*bilik*)で眠る。寝室の数は家屋の大きさによって決まる。この制度における父親の役割は、生殖システムの一部として特徴づけられる。したがって、父親が自分の妻の家に行くのは夜だけである。共有財産にたいする意見の不一致などの問題は父親の「代わり」として、*tungganai* (トゥンガナイ、通常は母親の最年長の兄弟)が非常に重要な役割を果たす。⁹ *paruik* (パルイック《訳注：インドネシア語では *perut*》；腹)の構成員が増えると、その一部はルマ・ガダンを出て、新しい居住地を開いたり別のルマ・アダットを建てたりする。通常、新しい居住地やルマ・アダットは元の場所から遠くないところに位置する。数軒のルマ・ガダン(パルイック)から形成される母系の単位は、*sapayuang* (サパユアン《訳注：インドネシア語では *sepayung*》；一つの傘)と呼ばれる。サパユアンの構成員をとりまとめる責務は *penghulu* (プンフル；サパユアンの長)にある。言い換えるとプンフルは、自分のパユアン(一般的にはパルイックのレベル)で発生し、トゥンガナイによっても解決できなかった問題に対して助言者、仲裁者、場合によっては裁判官の役割を務めるのみであるとも言える。したがって、プンフルは自分のパユアンを統治するわけではない。トゥンガナイと同様に、プンフルの地位はパユアン内の最も古い(おおもとの)パルイック出身の最年長男性に与えられる。しかし必ずしも以上のとおりではなく、この地位は他のパルイックにとって代わることが可能である地域も多い。パルイックは血縁関係にある他のパルイック共に *suku* (スク)と呼ばれる。スクの構成員は、一人の女性の始祖を持つと信じられているが、実際の始祖が誰なのかは分からなくなっている。スクの構成員の社会的な問題に対して責任をもつ最高位の男性は、*penghulu suku* (プンフル・スク)と名づけられている。パユアンおよびパルイックのレベルよりもスクレベルの問題の方がより複雑であるため、プンフル・スクは、その義務を遂行するにあたって、アダットの役員、すなわち *malim* (マリム；宗教問題を

⁹ 最近になって、この制度には大きな変化が起こっている。父親の役割が拡大する一方、*mamak* (ママック；母方のオジ)の役割は小さくなり、特にママックの役割は共有世襲財産にまつわる問題に限定されたものとなっている。

担当)、*manti* (マンティ; 執事)、および *dubalang* (ドゥバラン; 公安の維持を担当) の補佐を受ける。

語源的には、スクとはスカキ (*sekaki*; 1本の足) つまり、ヤギ、牛、および水牛のような家畜一頭の4分の1の部分の意味する。ミナンカバウのスクは、当初4つの主要なスク、すなわち Bodi (ボディ)、Caniago (チャニアゴ)、Koto (コト)、および Piliang (ピリアン) から成っていたため、1つのスクは初期のスクの4分の1を意味する。しかしながら、人口がますます増加し、外部の世界との交流もますます強まり、スクの数が増加した結果、最近ではミナンカバウには41もの *suku* がある。新しく現れたスクは、Balai Mansiang (バライ・マンシアン)、Banuhampu (バヌハンブ)、Batang (バタン)、Bendang (ベンダン)、Canduang (チャンドゥアン)、Capuak (チャプアック)、Capuak Napa (チャプアック・ナパ)、Dalimo (ダリモ)、Domo (ドモ)、Guci (グチ)、Jambak (ジャンバック)、Kampai (カンパイ)、Kutianyir (クティアニール)、Lamageh (ラマゲ)、Mandahiling (マンダヒリン)、Mandaliko (マンダリコ)、Melayu (ムラユ)、Lubuak Batang (ルブアック・バタン)、Pagacancang (パガチャンチャン)、Panai (パナイ)、Pangalu (パンガル)、Panyalai (パニヤライ)、Patapang (パタパン)、Pauh (パウ)、Payobada (パヨバダ)、Pisang (ピサン)、Salayan (サラヤン)、Salo (サロ)、Samabua (サマブア)、Sikumbang (シクンバン)、Simagek (シマゲック)、Singkuang (シンクアン)、Sipanjang (シパンジャン)、Sipasan (シパサン)、Sipisang (シピサン)、および Tanjung (タンジュアン) などである。これらのスクは、それぞれがさらに分裂し、その結果現在では約128にも及ぶ。¹⁰

この家族構造の帰結としては、財産および遺産は(母親から娘へと)女性が相続することになる。ミナンカバウで最も価値のある財産/遺産のひとつは、土地である。ある人の社会階層も土地の所有によって評価することができる。ナグリの中で社会的に重要な地位を保持する家族は、「*orang asa* (オラン・アサ)」(最初の移住者の子孫)とよばれ、この種の家族は、たいいてい広範囲の土地を所有している。彼らが「オラン・アサ」と呼ばれ、広範囲の土地を所有するのは、彼らこそがその地域もしくは村(ナグリ)で最初に居住地と農地として土地を開いたからである。

オラン・アサとして広い土地を所有する人々は、一般に村(ナグリ)行政でも重要な地位を占める。多くのナグリでは、通常彼らが自分たちの代表者を *penghulu pucuk* (最高位のプンフル) や宗教指導者の地位に付けることによって伝統 (*adat*) 的・宗教的に最も重要な権威を握る。

ミナンカバウの居住地の変容は、*taratak* (タラタック; 森を切り開くために居住する小屋、またその周辺を指す) の形成から始まった。タラタックは、最初に形成される居住地の単位である。この単位は通常、森林の周縁または森林の中に形成される。この単位の確立は、農業のための土地の

¹⁰ de Jong, *Minangkabau.....*, pp. 68-72

開墾と関係がある。ゆえにこの段階の居住地はまだ非常に簡素なものであった。農地を見張るために使用される小屋がいくつか建てられただけであり、それらの小屋は、まだ人が定住するためのものではなかった。したがって、その土地をはじめに開墾し、居住地をつくった人々が、いわゆる「オラン・アサ」の前身となる。

小屋の数と居住者の数が増加するとともに、タラタックは *dusun* (ドゥスン; 集落、村) へと発展した。この段階で、人々の生活はより安定化する。恒久的な住居が建てられ、生活する場所として整えられる。畑のほかに、住民は稲田も持つ。共有財産および *mamak kepala waris* (ママック・クバラ・ワリス; 遺産相続管理長) の形成も始まる。*Tuo Kampung* (トゥオ・カンブン; 村の長老) と *mamak rumah* (ママック・ルマ; 家長) の地位も存在した。3番目の定住地の単位は *koto* (コト《訳注: インドネシア語では *kota*》; 街、町) である。このコトの段階において家族構造が完成し、母系の社会制度が機能し始めた。人々が集会を行い、村行政が統治するための *Balai* (バライ; 講堂)、および宗教的な活動が行われるモスクなどが、すべて確立された。理念的にはコトの住民は、伝統的・宗教的な要素を満たした。しかし最もよく完成された定住地の単位は、ナガリである。この単位は、同時にミナンカバウ社会における最高の社会・政治的単位を構成する。新しい定住地がナガリになるための条件は、集会場と行政の中心であるバライ、礼拝や他の宗教活動を行う場所としてのモスク、交通手段のための村道、娯楽用の競技場、および公衆衛生のための公共浴場を持っている場合である。ナガリは、タラタック、ドゥスン、およびコトの人口増加の最終段階であるため、実際には1つの血筋でつながった連合体を形成するとも言える。ゆえに「オラン・アサ」は、ナガリにおいても依然、最も重要な地位を保持するのである。

ナガリは、明確な(自然の)境界を備えた固有の領地をもつ。境界とは小川、谷、丘陵、または森林、竹、人工の水路または *tanah rajo* (タナ・ラジョ; 王の地) などがある。

すべてのナガリには、固有の行政府がある。ナガリは *dewan penghulu* (デワン・プンフル; *adat* の指導者の評議会) によって指導され、評議員の1人が指導者 (*Kepala Nagari*) クバラ・ナガリ; ナガリ長) として選出される。ミナンカバウの政治の伝統に従えば、ナガリの住民は皆で指導者を選出する。ただし、オランダの植民地時代には、クバラ・ナガリの選挙と任命は植民地政府による干渉を受けた。プンフルの中には *besluit* (任命書) を付与された者もいたので、いわゆる「*panghulu basurek*」(書類つきプンフル) という言葉が流行るほどであった。こうした干渉は印蘭植民地政府が、ナガリをこの地域の植民地行政機構の最低単位とした1823年から始まった。行政的課題に従事するほか、クバラ・ナガリは、印蘭政府の利益のためにナガリ住民を強制労役に動員したり、税すなわち *belastin* (ブラスティン) の徴収にあたりたりもした。ナガリ行政の植民地的状況は、1946年に「*dewan perwakilan nagari* (デワン・プルワキラン・ナガリ)」(ナ

ガリ代表議会)と「*dewan harian nagari* (デワン・ハリアン・ナガリ)」(ナガリ常任理事会)が設立されたことによって終焉を迎えた。そのため、その時からインドネシア共和国革命政府の蜂起が始まるまで(1950年代初頭、数年間のわずかの例外を除いて)、ナガリ行政はその歴史上で最も民主的な時代を経験したと言われている。しかし、新秩序(Orde Baru; スハルト政権時代を指す)には、ナガリ行政に対する政府の干渉が復活したばかりでなく、その時代にはナガリの存在はいったん廃止されもした(UU No. 5/1979、Perda No. 7/1983; 1979年第5号法令および1983年第7号地方条例)。² ミナンカバウにこれまでに存在したナガリの数については、明確な公式データはない。こうした資料の不足は、ナガリのダイナミックなあり方に起因する。新しいナガリは、とあるナガリの人口が過剰になったり、過少になったりすれば新しく設立されたり廃止されたりもする。それでも新秩序時代の政府がナガリを廃止した時点では、約574のナガリが存在していたとされている。UU No. 22/1999(1999年第22号法令)の施行に続いて、新秩序時代の政府によって廃止されたナガリは、Perda No. 9/2000(2000年第9号地方条例)の成立によって回復された。

tanah ulayat (タナ・ウラヤット; 共有地)に関しては、*kaum* (カウム; 群、集団、パユアン)はカウムの共有地を持ち、スクはスクの共有地を持ち、さらにナガリはナガリの共有地を持つ。カウムの共有地は、さまざまな社会的・経済的需要のためにカウムの構成員が使用する。通常、この種の土地は、稲田、畑、および屋敷地の形をとり、最初の居住地の近くに位置する。スクの共有地は、スクにより、世代を下って所有および管理され、既述のプンフル・スクがこの土地を治め、スクの構成員のために使用する。一般にこの種の土地は、墓地、家畜用の庭、藪、または沼で構成され、最初の定住地のはずれに位置する。ナガリの共有地は、ナガリの住民が権利を持つ、ナガリ内の一区画の土地であり、ナガリの指導者によって治められる。通常この種の土地は、公共施設や将来の開墾のための予備地としての森林で構成され、最初の居住地から比較的離れたところに存在する。

これらの共有地は、「*harta pusaka tinggi* (ハルタ・プサカ・ティンギ)」(高い遺産)とも呼ばれる。一方で、「*tanah pusaka rendah* (タナ・プサカ・ルンダ)」(低い遺産)という語もある。後者は、寄付、贈与、または個人的収入によって得られるものである。

ミナンカバウの伝統的規則では、共有地は売ることも、質に入れることもできないと強く規定されている。土地を売却した場合は代替地を探さなければならず、質に入れた場合は完済する義務がある。この規則は、土地と *ulayat* (ウラヤット; 使用) とを区別する重要な原則に基づいている。この土地は物理的に共同体に属し、所有権は移動できないが、他方その

² UU は *Undang-undang*(法律)、Perda は *Peraturan Daerah*(地方または州の条例)を意味する。

ulayat (使用) はプンフルの権威に依存している。ミナンカバウの伝統的規範におけるウラヤットの権利は、1) 特定の個人ではなく共同体が所有し、2) 所有権は移動不可能で、3) 伝統に照らして許容できる理由がある場合にのみ一時的に手放すことができる、というものである。

残念なことに、オランダの植民地時代以降、この土地に対する伝統的規範は、外部からの干渉を受け始め、長期にわたる争いをもたらした。ましてや、ミナンカバウのすべての要素が、継続的にこの伝統的規範に従ってきたわけではなかったとなれば尚更のことである。たとえば、オランダの植民地時代、西スマトラの *Domeninverklaring* (ドメニンフェルクラーリン; 領土宣言) に関する *Staatblad* (スタートブラット; リスト、一覧) 1915年9号の「Agrarische Wet (アグラリス・ヴェット; 農地法)」では、ナグリ、スク、およびカウムの共有地の地位は、オランダ王国の領土内であると明記されていた。UUPA では、³ ナグリの共有地は国有地になったと明記されていた。住民の中に自分たちの土地を登記する者も現れはじめると、この対立は発展してゆくことになった。共有地の登記をめぐる、賛成者と反対者に別れた。この問題は、現在もなお続いている。

コトパンジャンの水没による社会・文化的損失

これまでの説明に基づいて、コトパンジャン発電所の建設がいくつかの問題を引き起こしたということが言える。とりわけ以下の諸問題である。

1. 村の水没によって、村人は彼らの生誕地、および故郷との間の(精神的および)社会的絆を断ち切られた。
2. 村との関係が断ち切られたことによって、かつての村人は「村なし」人 (“villageless” people) となった。一方で、村は西スマトラ人のアイデンティティの象徴である。西スマトラ内外のほとんどすべてのミナンカバウの団体には、村落の名前がつけられている。2人の西スマトラ出身者が自分の村の外で出合った場合、ふつうは互いに相手の村の名を尋ねる。
3. 村民たちは新しい場所へ移されたが、新しい村では、彼らと村との間の精神的な絆というものはありえなかった。ましてや、現地の慣習法の規定に基づいて彼らの移転が執り行われることはなかった。彼らは新しい場所に移住させられたが、その際、彼らの(ミナンカバウの) 伝統的な社会・文化的側面はまったく考慮されなかった。たとえば、同じ曾祖母を持つ非常に近い家族 (パルイック) とも同じ場所には移住できなかったのである。こうした移住によって、パルイックの母系単位は分断された。またそれによって、新しい定住地では新しい家族関係が持ち込まれた。そこでは、父親、母親、および子供で構成される核家族がますます優勢になっていくのである。

³ UUPA は *Undang-undang Pokok Agraria* (農業・農地に関する基本法) を表す。

る。伝統的な氏族の指導者（トゥンガナイやプンフル）は片隅に追いやられ、まもなくこの地位は消え失せることが懸念される。

4. 村の水没は、人々の土地が水没することを意味した。土地が水没したことによって、人々の土地に対する権利も消滅した。しかしながら、実に土地というものは、コトパンジャン出身の人々にとって最も重要な世襲財産であり、ミナン人（ミナンカバウ人）の基本的権利の1つなのである。ミナンカバウの慣習法によると、彼らの土地を手放すことは許されない。もし土地が無くなれば、不運や災難が降りかかると信じられている。そのような不運や災難は、土地を手放した当事者に直接起こったり、住民全体に起こったりするのである。また、何らかの理由で虐げられた住民たちは、特に新しい場所、新しい村で起こるもの、また一般的にはインドネシア民族のレベルで起こるさまざまな困難や悲劇が、彼ら自身、もしくはインドネシア民族に対する神からの「裁き」としてしばしば関連付けることがある。
5. 村人たちが新しい場所に新しい土地を与えられたこと、言い換えれば、水没した土地に対する補償があったことは事実である。しかし、その新しい土地は、彼らにとって社会・文化的意義を持たない。そればかりでなく、多くの場合、新しい土地は彼らの失った土地よりも狭く、また地味もかつての土地に比べてそう良くはない。代替地というのは、一般的には肥沃でない粘土質の土地である。したがって、彼らはそのような代替地でも収穫が得られるように、土地の耕作にたくさんの時間、労力、資金を費やすのである。実際には、そのような豊かでない土地のため、彼らの事業の多くが失敗している。
6. 新しい地へ、かつてと同じ土地の所有権などの権利および義務を得て移住したことによって、彼らが有していた社会・文化的価値観はしだいに失われていくであろう。プンフルの地位やその他のアダットの役職は、新しい定住者の争いの対象となる可能性がある。というのは彼らが皆、同じ地位、権利、および義務を持つと考えるかもしれないからである。かつてのナグリでは、人々は「オラン・アサ」の特権を認めており、最初の定住者の子孫は、プンフルおよびその他のアダットの役職に就く資格がある。アダットの役職につく人々とは例えば、ダトゥック・シパドゥコ（Datuk Sipaduko；母系氏族 Domo Dibaruah 《ドモ・ディバルア》のプンフル）、ダトゥック・パドゥコ・マラジョ（Datuk Paduko Marajo；母系氏族 Domo Dibukit 《ドモ・ディブキット》のプンフル）、ダトゥック・ビジョ・ディラジョ（Datuk Bijo Dirajo；母系氏族 Piliang Rumah Gadang Diulak 《ピリアン・ルマ・ガダン・ディウラック》のプンフル）、ダトゥック・タン・シマラジョ（Datuk Tan Simarajo；母系氏族 Piliang Rumah Gadang Dimudiak 《ピリアン・ルマ・ガダン・ディムディアック》のプンフル）、およびダトゥック・マラジョ（Dt. Marajo；母系氏族

Melayu 《ムラユ》のプンフル) などである。各プンフルは、自分の仕事を遂行する際に、マリム、マンディ、およびドゥバランによって補佐される。5人のプンフル全員がダトゥック・シパドゥコをプンフル・プチュック（ナガリで最高位のアダット指導者）として選出することで合意した。ダトゥック・シパドゥコの選出は、彼が最初にこの村を作った男性であるという、地域の人々の伝統的信条に基づいていた。彼らの村が水没した現在、この伝統的信条は疑問視されはじめた。最初の定住者の子孫が持つ、村のいくつかの特別な地位に対する「特権」が、村のその他の構成員からも主張され始めた。または村で発生する多くの問題での交渉者、または裁判官としての彼らの権威も消滅していくであろう。

7. 村の水没は、それ以前に村人によって厳格に守られていた多種の口承の伝統が消失することも意味した。いくつかの歴史的な説明およびアダット（慣習）の説明は、口承の伝承によって「記録」され、広められていた。それはミナンカバウの人々、特に村に住んでいる一般の人々が、記述により伝承を発達させる意識を十分に持っていなかったためである。村の歴史や村に関する数多くの伝説は、口承の伝承という形で存在するだけである。口承の伝承の特徴として、叙事的な側面を強めるために、その物語は常に、人や動物に似た石や、家具、舟、カヌーに似た自然界の物体、魔力を持つと信じられている特別な場所（丘、丘の頂上、川、河口、井戸、大木、巨石など）に関係している。また、コトパンジャンダム建設は、村の歴史と密接にかかわる数百、数千の口承の歴史や村の歴史、道徳的な教えを含んだ物語、農耕儀式、その他の宗教儀式に関わる伝承を消滅させた。道徳的教えや社会・宗教的価値を含んだ数多くの物語との歴史的なつながりがあると住民が信じていた多くの場所が水没した。それらは、かけがえのないものばかりである。これは歴史的遺産と地方文化の全体にとって、甚大な、途方もない損失である。
8. コトパンジャンダム建設は、直接的には寺院を水没させていない。しかし考古学のおよび歴史的研究によって、寺院付近の環境が、水の侵入によって寺院の物理的状態に影響を与えることが分かっている。一枚岩で造られたボロブドゥール (Borobudur) のようなジャワ島の他の寺院と異なり、ムアラ・タクス (Muara Takus) 寺院は粘土（煉瓦）で造られているため、浸水によって寺院の破壊が加速される可能性がある懸念されている。おそらく、50年以内に寺院は重大な被害を受ける。さらに、いくつかの知見によると、寺院の一部は地表面より下に埋もれている。ムアラ・タクス寺院の破壊によって、ヒンズー教／仏教時代のミナンカバウの歴史を明らかにすることは困難になる。ムアラ・タクス寺院は、現在まで東スマトラ地域でその時代のミナンカバウの歴史を明らかにするための唯一の歴史的証拠だからである。さらに寺院の破壊は、ミナンカバウの人々、

特にリマプル・コタおよびカンパルの人々の誇りを傷つけるであろう。

9. 村の水没によって、古代のミナンカバウに関する歴史的研究も困難になっている。前述のように、*tambo* では、ミナンカバウ人の祖先はタナ・ダタルからアガムおよびリマプル・コタへと広がり、さらにこれらの地域から近隣地域へと分かれていったとされている。口承の伝承は経験的な証拠に支えられていないので、科学的には受け入れることができない。論理的にいつて、こうした広がり方はつじつまが合わない。インドネシア人の移動の学説によると、インドネシア人の祖先は *Hindia Belakang* (ヒンディア・ブラカン; 後インド) 出身だからである。経験的な考古学的証拠に基づく、ミナンカバウの人々はその地域にも起源を持ち、ロカン川、カンパル川、シアック川、インドゥラギリ川、およびバタンハリ川といったスマトラの東海岸へと流れる大河を通じてミナンカバウ地域に入ってきた。これに対する考古学的証拠は、有史以前リマプル・コタ地方の人々の住居であったいくつかの洞窟にも存在する(それらの洞窟の中には、石でできた、または石に彫られた古代の遺物が残されている)。さらに、リマプル・コタの数カ所に広がっている巨石文化も発見されている。以上のことから、リマプル・コタ地方は、オランダ植民地時代以前のミナンカバウの人々の歴史を明らかにするために、非常に重要な地域であるといえる。こういったリマプル・コタ地方の重要性は、ムアラ・タクス寺院の存在によってより一層大きくなる。この寺院は、ヒンズー教/仏教時代のミナンカバウの歴史をたどるうえで、きわめて重要である。そのうえ、ミナンカバウの伝統的な社会機構と政治体制は、(おそらく)その時代に基礎を置くと考えられることから、この時代はミナンカバウの歴史においてかなりの重要性を持つ。言語学的研究の成果によっても、リマプル・コタがミナンカバウで最古の地域であることが示されている。この結論は、ミナンカバウに存在する 17 の方言のうち、リマプル・コタ地方の方言が最も古いことを示す知見に基づいている。コトパンジャンが水没したことによって、数多くの歴史的資料が水没し、ミナンカバウの歴史を解明する作業はより困難になったのである。

とるべき方策:

1. プロジェクトの継続を中止し、打ち切ること。
2. 失われた社会・文化的側面の全体について一覧表を作成し、文書にすること。
3. 作成した一覧表および文書を書籍として出版し、それを社会に広め、特に小学校から高等学校までの学生に配布すること。
4. 貯水池の水位を 75 m 以下に維持すること。